



Warga Khawatir Tak Bisa Bayar

Tarif PBB Naik Hingga 400 Persen Dikeluhkan

Perlu Ada Sosialisasi

YOGYA, TRIBUN - Warga Patangpuluhan, Kota Yogyakarta mengeluhkan tingginya Pajak Bumi Bangunan (PBB). Kenaikan PBB ini berkisar antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah, warga berharap kenaikan ini disosialisasikan sebelumnya.

Hal itu terungkap saat forum rapat RT di RT 04 RW 01 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta.

Ketua RT 04 RW 01, Patangpuluhan, Wirobrajan, Sugiyono mengatakan hampir seluruh warganya mengeluhkan kenaikan PBB. Bagaimana tidak, pajak yang harus dibayarkan naik lebih dari 100 persen.

"Semuanya mengeluhkan kenaikan (PBB). Kok tinggi sekali, beda jauh sama yang tahun lalu. Ada warga yang sebelumnya bayar Rp600 ribuan, sekarang bayar Rp1 juta lebih. Ada yang kemarin Rp7 juta, sekarang naik jadi Rp21 juta, kan tinggi sekali. Banyak yang mengeluh," katanya, Minggu (16/2).

"Punya saya juga naik. Tahun lalu Rp114 ribu, tahun ini Rp216 ribu. Ya sekitar 100 persen. Semua naik (PBB), tetapi beda-beda. Ada yang sedikit ada lebih dari 100 persen," sambungnya.

Sugiyono
Ketua RT 04 RW 01 Patangpuluhan, Wirobrajan

MELONJAK DRASTIS

Warga Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta mengeluhkan tingginya Pajak Bumi Bangunan (PBB). Kenaikan PBB ini mencapai lebih dari 100 persen dari sebelumnya.

• Dari catatan ada warga yang sebelumnya bayar Rp600 ribuan, sekarang bayar Rp1 juta lebih.

• Ada yang kemarin Rp7 juta, sekarang naik jadi Rp21 juta. Warga mengeluhkan kenaikan PBB yang melonjak drastis lantaran belum ada sosialisasi sebelumnya.

• Warga khawatir tidak mampu membayar PBB, sebab kenaikan warganya hanya konyong bisa bahkan beratus. DPRD Kota Yogyakarta meminta Pemkot mencabut keputusan kenaikan PBB.

• Kenaikan PBB sangat tidak masuk akal karena PBB mencapai 400 persen. Kenaikan PBB sangat tinggi karena PBB naik dari Rp600 ribu ke Rp21 juta. Warga mengeluhkan kenaikan PBB yang melonjak drastis.

Warga Khawatir Tak Bisa Bayar

● Sambungan Hal 9

Ia dan warganya sebetulnya tidak keberatan dengan kenaikan PBB. Sebagai wajib pajak, ia pun akan taat membayar pajak. Namun, ia menyalahkan kenaikan tarif PBB yang melonjak drastis. Bahkan tidak ada sosialisasi sebelumnya.

"Tidak keberatan kalau naik, tetapi ya jangan langsung tinggi. Naik 10 persen begitu tidak apa-apa. Lha ini dari kelurahan atau dari pemerintah tidak ada sosialisasi, langsung mendapat blangko seperti itu (sudah naik)," terangnya.

Sugtyo khawatir, warga tidak mampu membayar PBB, sebab pekerjaan warganya hanya karyawan biasa bahkan buruh. "Cuma pegawai biasa, buruh, saya sendiri cuma ojek online. Ya ada kekhawatiran tidak bisa membayar, apalagi sangat tinggi. Makanya kemarin warga ya mengeluh," ungkapnya.

Pihaknya belum berkoordinasi ke kelurahan terkait keluhan warga tersebut. Namun menurut informasi yang

ia terima, warga bisa mengajukan keringanan. Meski demikian keringanan yang diterima maksimal hanya 10 persen.

Tidak masuk akal

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto meminta Wali Kota Yogyakarta untuk mencabut keputusan kenaikan PBB. Menurut dia kenaikan PBB sangat tidak masuk akal karena mencapai 400 persen.

Fokki menilai Pemkot sangat tidak memahami ekonomi masyarakat. Menurutnya saat ini masyarakat sedang berupaya meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan, namun di sisi lain kebijakannya justru mencekik masyarakat.

"Kenaikan PBB ini sangat mencekik masyarakat karena kenaikan mulai 200-400 persen. Dalam reses penjangkaran aspirasi, masyarakat mengeluhkan pajak PBB yang sangat tinggi," katanya.

Fokki melanjutkan, pihaknya telah meminta penjelasan dari Asisten Daerah Bidang Perekonomian, Kadri Renggono. "Kami sudah konfirmasi pak Kadri. Pak Kadri menyampaikan kalau kenaikan PBB, karena Pemkot

melalui BPKAD tahun 2020 menaikkan kelas nilai tanah dan bangunan, yang berakibat pada kenaikan NJOP PBB," lanjutnya.

Ia pun menyalahkan keputusan kenaikan pajak yang tidak didahului dengan sosialisasi. Ditambah kebijakan tidak pernah dikomunikasikan kepada lembaga DPRD. "Kami akan meminta Ketua DPRD Kota Yogyakarta memanggil Wali Kota Yogyakarta dalam rapat konsultasi untuk dapat dimintai penjelasan dan klarifikasinya atas persoalan tersebut," tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan hal ini, *Tribun Jogja* berusaha menghubungi Asisten Bidang Perekonomian Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono untuk konfirmasi lebih lanjut, namun Kadri enggan memberikan penjelasan. Hal itu karena PBB menjadi ranah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

Saat dihubungi *Tribun Jogja*, Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Wasesa enggan memberikan keterangan melalui telepon. "Besok (hari ini) langsung datang ke kantor saja ya," katanya singkat. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005